

PENGENALAN KONSEP DAN PRINSIP JURNALISME PEMBANGUNAN

OLEH

HADIYANTO

**DIVISI KOMUNIKASI DAN PENYULUHAN
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN
MASYARAKAT
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

2022

PENDAHULUAN

Latar belakang

Kurikulum baru pada Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (IPB 2020) menawarkan salah satu konsentrasi atau *mayor elektif* bagi mahasiswa baru angkatan 2018/2019 yaitu “Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan,” di samping dua konsentrasi lainnya, yaitu (1) “Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan,” dan (2) “Pengembangan Masyarakat.” Munculnya matakuliah Jurnalistik Pembangunan merupakan kelanjutan dari matakuliah “Dasar-dasar Komunikasi Pembangunan” yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pembentukan kompetensi pada konsentrasi atau minat Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan (KPP) sekaligus memberi sumbangan pada pencapaian *Learning Outcomes* Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat.

Sebagai “metamorfosa” dari matakuliah sebelumnya, yaitu Komunikasi Massa, matakuliah Jurnalistik Pembangunan (selanjutnya disingkat JP atau Jupe) memberi penekanan pada sisi jurnalistiknya, yang sebenarnya sudah diberikan pada paruh terakhir perkuliahan komunikasi massa, terutama untuk memperkuat Implementasi nyata dari Komunikasi Massa yang relevan dengan fungsinya untuk mendukung pembangunan, baik pada aras nasional, regional maupun lokal (komunitas).

Mata kuliah Jupe diberikan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar tentang jurnalistik pembangunan. Materi kuliah terdiri dari aspek teoritis dan praktis untuk memberikan pemahaman tentang dasar konsep dan teori jurnalistik, media massa, dan komunikasi massa dalam pembangunan, serta aspek praktis untuk memberikan dasar-dasar pengembangan keterampilan membuat karya jurnalistik.

Setelah mengikuti matakuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis dan membuat karya jurnalistik untuk advokasi, mobilisasi/aliansi, dan pengembangan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat

1. Mampu memahami konsep dasar jurnalistik pembangunan untuk advokasi, mobilisasi/aliansi, dan pengembangan kapasitas
2. Mampu menjelaskan dan membedakan format, fungsi, dan isi berbagai media jurnalistik untuk advokasi, mobilisasi/aliansi, dan pengembangan kapasitas
3. Mampu menganalisis format, isi, tampilan, dan kualitas media jurnalistik untuk advokasi, mobilisasi/aliansi, dan pengembangan kapasitas
4. Mampu membuat karya jurnalistik dan merancang media untuk advokasi, mobilisasi/aliansi, dan pengembangan kapasitas

Mengapa harus belajar Jurnalistik Pembangunan? Jurnalistik Pembangunan sebagai mata kuliah di Prodi KPM merupakan kelanjutan dari “Dasar-dasar Komunikasi Pembangunan” yang diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pencapaian kompetensi pada konsentrasi minat **Komunikasi dan Penyuluhan Pembangunan**. Secara eksplisit disebutkan antara lain, dalam lingkup praktek komunikasi pembangunan bisa berupa; (1) komunikasi komunitas, (2) komunikasi pendidikan, (3) siaran komunitas, (4) jurnalisme pembangunan, dan (5) komunikasi sains.

Studi Komunikasi sebenarnya diawali dengan kajian di bidang jurnalistik, sehingga bila menengok sejenak di dalam sejarah pendidikan keilmuan komunikasi di Indonesia, Jurusan Jurnalistik lebih dikenal. Bahkan dulu di Unpad Bandung, Fakultas Ilmu Komunikasi awalnya adalah Fakultas Publisistik (sebutan lain untuk jurnalistik). Kemunculannya terkait dengan tuntutan dari dunia industri, khususnya pers/media

massa, yang sangat membutuhkan sarjana jurnalistik untuk profesi jurnalis atau wartawan. Industri pers yang dikenal sampai sekarang adalah penerbitan surat kabar atau koran selain majalah, radio, dan televisi.

Sejak era digital sampai saat ini juga memberikan pengaruh besar dalam bidang jurnalistik yakni memberikan "lapangan luas" bagi praktek-praktek jurnalistik secara mandiri oleh warga masyarakat melalui jurnalisme warga yang sudah berkembang lebih dari sepuluh tahun terakhir. Jurnalistik menjadi mengalami perluasan makna, tidak hanya bersentuhan dalam bidang tulis-menulis akan tetapi juga terkait dengan karya jurnalistik lainnya semacam foto jurnalistik atau video jurnalistik.

Jurnalistik pembangunan berusaha memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk:

1. menjadi wartawan atau jurnalis pembangunan
2. menjadi komunikator pembangunan lainnya khususnya yang bersentuhan dengan program pemberdayaan masyarakat
3. Komunikasi-kehumasan di lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah (Non Government Organization=NGO) atau perusahaan swasta dalam menyusun *press release* atau berhubungan langsung dengan pers atau media massa melalui *media relation* yang dibangun bersama secara simbiosis mutualistis
4. Mengelola "*in house journal*" suatu bentuk publikasi internal bidang kehumasan (public relation) yang menuntut kemahiran bidang jurnalistik termasuk merancang medianya
5. Menjadi jurnalis warga dan mengelola jurnalisme warga/komunitas.

Sebagai mata kuliah yang relatif baru masih sangat terbatas referensi dan bahan bacaan yang relevan terutama dalam konteks Indonesia, sehingga sangat diperlukan rintisan penyusunan "Buku Pegangan" sebagai bahan bacaan utama untuk mahasiswa. Tulisan ini merupakan usaha rintisan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.

Tujuan

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, tujuan dari tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Sejarah lahirnya Jurnalisme Pembangunan dalam kaitannya dengan Komunikasi Pembangunan
2. Menjelaskan Konsep dan prinsip jurnalisme pembangunan dari beberapa perspektif
3. Menjelaskan penerapan kebijakan jurnalistik pembangunan di Indonesia

SEJARAH LAHIRNYA JURNALISME PEMBANGUNAN

Jurnalisme Pembangunan dan Komunikasi Pembangunan

Membahas jurnalisme¹ pembangunan dan komunikasi pembangunan laksana orang yang berjalan mondar-mandir untuk menemukan titik temuya. Sampai akhirnya pada satu pemahaman bahwa keduanya tidak bisa dipisahkan begitu saja, ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. **Seperti yang pernah disinggung dalam materi kuliah Komunikasi Pembangunan, bahwa lingkup praktek Komunikasi Pembangunan adalah salah satunya “Jurnalisme Pembangunan.”** Seperti dungkapkan oleh Jayaweera & Amunugama (1987) bahwa Jurnalisme pembangunan berakar pada komunikasi pembangunan, berkaitan dengan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh “Land-Grand University” di Amerika Serikat. Akhirnya, itu berkembang menjadi doktrin komunikasi pembangunan dalam sebuah seminar tahun 1964 yang diselenggarakan oleh East West Center di Honolulu yang memformalkan konsep tersebut. Quebral (1986) yang pernah dijuluki “Ibu Komunikasi Pembangunan,” seperti dikutip Nasution (1996) menyebutkan bahwa:

“Jurnalisme Pembangunan dan Komunikasi Pembangunan, saling berpautan satu sama lain, karena memang merupakan hasil pencarian bersama akan isi dan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menuju suatu kehidupan yang lebih baik. “

Jauh sebelumnya, Schramm (1964) secara tersirat menyoroti peranan media massa (termasuk pers sebagai wadahnya jurnalisme) dalam pembangunan nasional terutama dalam menjalankan fungsinya sebagai “whatchman function” yang dikalangan jurnalis mungkin lebih dikenal dengan perannya sebagai “whatchdog.” Pers juga bisa berperanan dalam memperluas horison atau wawasan masyarakat, bisa memfokuskan perhatian masyarakat pada isu-isu pembangunan, menumbuhkan aspirasi dan mampu menciptakan suasana membangun (Schramm 1964). Atau dalam ungkapan yang populer pada masa itu pers sebagai “agen pembangunan” atau “*agent of change*” (Rachmadi 1990).

Jurnalisme Pembangunan: Perspektif Asia

Sebelum membahas lebih jauh tentang Jurnalisme Pembangunan, untuk memahami konteksnya maka sangat penting untuk mengetahui sejarah kelahiran Jurnalisme Pembangunan. Hampir semua ahli (scholar) yang menulis jurnalisme pembangunan (Lent 1977; Ogan 1982; McKay 1993; Xu 2009) sepakat bahwa peranan dari **Press Foundation of Asia** yang berdiri tahun 1967 dan

¹ Istilah jurnalistik dan jurnalisme dalam pemaknaanya sama saja, dalam tulisan ini bila berkaitan dengan konsep lebih memilih menggunakan istilah jurnalisme sebagai terjemahan dari *journalism*, akan tetapi untuk merujuk ke pengertian praktek misalnya dalam penulisan akan memilih menggunakan istilah “jurnalistik.”

berkedudukan di Manila Philippina, sangat sentral dalam memberikan ruang untuk mempromosikan Jurnalisme Pembangunan.

Terbukti pada pertengahan 1968 (14 Agustus–5 September) menyelenggarakan kursus dan latihan penulis ekonomi se Asia pertama yang disponsori The Thomson Foundation. Dipicu oleh munculnya kesadaran dari kalangan jurnalis di Asia terhadap perlunya menggunakan media massa cetak dalam mendukung tujuan-tujuan pembangunan. Mereka berkeinginan untuk melaksanakan kebijakan pemberitaan yang mendukung peliputan pembangunan. Di sisi lain, bersamaan dengan semakin dikenal luasnya paradigma komunikasi pembangunan (*ingat kembali pendekatan modernisasi, dependensi dan partisipasi*), kalangan jurnalis di Asia percaya dan diharapkan memainkan peran kunci dalam memfasilitasi dan mendorong pembangunan nasional.

Tokoh yang memelopori kursus dan latihan ini terdiri dari tiga serangkai, yaitu Alan Chalkley, Erskine Childers² dan Juan Mercado yang kala itu menjadi Direktur *Philippine Press Institute*. Chalkley selanjutnya dikenal sebagai pencetus sebutan Jurnalisme Pembangunan atau Jurnalisme Pembangunan. Seperti diungkapkan Lent (1977) Jurnalisme Pembangunan itu sendiri baru digunakan secara resmi pada tahun 1968 sebagai kelanjutan dari program kursus atau pelatihan jurnalis dan penulis masalah ekonomi tersebut.

PFA pada tahun 1970 juga mendirikan kantor berita sendiri yang diberi nama DEPTHnews (*Development, Economic, and Population Themes*). Salah satu alasan yang mengemuka berdirinya kantor berita tersebut karena berkembangnya pemikiran bahwa Jurnalisme model barat dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kebutuhan di negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sebagian diantaranya baru lepas dari cengkeraman penjajah.

DEPTHNews memfokuskan liputannya pada isu-isu pembangunan seperti masalah perempuan, sains, kesehatan, pembangunan desa, dan lingkungan dengan mengabaikan masalah politik, militer dan bencana alam (Xu 2009). Sementara menurut McKay (1993), 60 persen tulisan di DEPTHnews berkaitan dengan masalah-masalah pembangunan, seperti pertanian dan pembangunan desa, masalah-masalah sosial dan kesehatan, serta lingkungan. Sebaliknya, hanya 20 persen tulisan yang mengangkat topik politik, pemerintahan, dan militer, sedangkan selebihnya tentang ekonomi dan keuangan. Gambaran ini kontras dengan yang dilakukan kantor berita barat yang relatif rendah perhatiannya pada masalah-masalah pembangunan.

Sementara pada “jurnalistik barat”, pemberitaan lebih menekankan pada peristiwa daripada proses yang menyebabkan suatu peristiwa. Praktek jurnalisme lebih mengandalkan sensasi dan komersialisasi. Hanya sedikit yang meliput atau kurang menyoroti peristiwa yang penting secara sosial, seperti proyek pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan bagi kepentingan warga setempat.

² Erskine Childers dikenal sebagai tokoh sentral yang memperkenalkan gagasan tentang Development Support Communication yang selama 1967-1975 bermarkas di Bangkok sebagai tokoh kunci di UNDP. Di bawah program UNDP terdapat salah satu unit yang disebut Development Support Communication Service (DSCS).

Jurnalistik Pertanian: Perspektif Amerika

Berbeda dengan di Asia, sebagaimana dikemukakan Jayaweera & Amunugama (1987) di Amerika Serikat sejak awal tidak menggunakan terminologi atau istilah Jurnalisme Pembangunan (Jupe), tetapi lebih dikenal dengan Jurnalisme Pertanian (Agricultural Journalism). Penerapannya sendiri sudah jauh sebelum munculnya teori pembangunan pada pasca PD II. Amerika Serikat yang sudah merdeka sejak abad ke-18 silam tentunya sudah mengalami perkembangan di bidang pertanian dan ilmu-ilmu pertaniannya ketika negara berkembang baru memasuki era pembangunan.

Jurnalisme Pertanian dalam praktek sudah jauh berkembang Di Amerika Serikat. Penggunaannya bahkan sudah ada sejak pertengahan abad ke-19. Sebab di Amerika sendiri, sejak tahun 1840 telah berkembang media massa cetak yang dikhususkan untuk tujuan-tujuan mendukung kemajuan di bidang produksi pertanian. Banyak media yang diterbitkan difokuskan untuk penyebarluasan informasi dan teknologi baru dalam bidang pertanian. Tidak kurang 300 berkala khusus untuk bidang pertanian dengan tiras mencapai 100 ribu eksemplar telah diterbitkan.

Jurnalisme Pertanian kemudian mendapat perhatian kalangan ilmuwan di perguruan tinggi pertanian. Hampir di seluruh "college" pertanian terkemuka menawarkan mata kuliah "Jurnalisme Pertanian." Diperkenalkannya mata kuliah Jurnalisme Pertanian di perguruan tinggi sejak 1950an bisa dilacak dari Buku yang ditulis **William B. Ward** tahun 1959 yang berjudul "**Reporting Agriculture Through Newspaper, Magazines, Radio, Television** " menjadi bukti keberadaan mata kuliah tersebut. Pada tahun yang sama juga terbit sebuah buku yang berjudul "**Agricultural News Writing**" yang ditulis oleh Claron Burnett, Richard Powers, dan John Ross.

Jurnalisme Pertanian yang memadukan antara peliputan berita seperti surat kabar umumnya, dengan "*information stories*" dalam bentuk; *advice story*, *how-to-do story*, *reporting research results*, dan *statistical report*. Beberapa topik yang dibahas dalam buku tersebut antara lain, konsep dasar penulisan berita, teknik penulisan berita, wawancara, sumber-sumber informasi, "*information stories*" dan "*feature stories*" serta beberapa aspek lagi yang lebih teknis. Secara keseluruhan materi dalam buku ini berisi 21 bab (Burnett, et al. 1973).

Jurnalistik Pertanian sendiri kemudian didefinisikan sebagai berikut:

"Jurnalisme Pertanian adalah cabang khusus Jurnalisme yang berhubungan dengan teknik-teknik penerimaan, penulisan, editing dan pelaporan informasi dari sumbernya tentang pertanian melalui koran, periodikal, radio, televisi, periklanan dan sebagainya serta proses manajemen dalam produksinya."

Dua tahun sebelum menerbitkan bukunya yang fenomenal tentang Difusi Inovasi, Rogers (1958) telah melaporkan bahwa sebanyak 48 persen para petani di Amerika Serikat memperoleh informasi tentang cara-cara bertani yang baru dari media massa cetak, baik berupa surat kabar maupun majalah. Jumlah ini merupakan yang terbanyak dibandingkan sumber informasi lainnya. Hanya tiga persen saja yang mengaku diperolehnya dari radio atau televisi. Fakta-fakta di atas memberi bukti bahwa pemanfaatan media massa cetak dalam pembangunan (pertanian) sebenarnya sudah berlangsung lebih dari satu abad.

Fakta tersebut dilatarbelakangi tingkat *literacy* yang sudah tinggi di sana, termasuk petaninya yang berbeda dengan di Indonesia, sehingga kesadaran untuk memanfaatkan media massa, khususnya surat kabar dan majalah sudah lama tumbuh. Secara umum budaya baca sudah menjadi ciri dari negara-negara maju pada masanya.

Kedua akar sejarah lintas benua ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap penerapan atau praktek Jurnalistik yang dikembangkan oleh kalangan media atau pers maupun pemerintah dalam kebijakan komunikasi pembangunannya, khususnya penyuluhan pertanian, termasuk di Indonesia.

Pengertian Jurnalisme Pembangunan

Istilah jurnalisme berasal dari kata “journal” yang dewasa ini masih sering dipakai sebagai sebutan majalah ilmiah. Kata ini juga awal mulanya berasal dari kata latin “diurna” yang berarti harian atau setiap hari. Oleh karena itu Jurnalisme bermakna “suatu pengelolaan laporan harian yang menarik minat khalayak mulai dari peliputannya, penulisannya, sampai penyebarannya. Apa yang dilaporkannya adalah peristiwa apa saja yang terjadi di berbagai aspek kehidupan manusia di dunia bersama penjelasan dan pendapat seseorang tentang suatu peristiwa.

Produk inilah yang populer dengan sebutan “berita” atau “news.” Atau dengan perkataan lain, fakta yang berupa peristiwa/kejadian atau pendapat seseorang belum disebut berita jika tidak dilaporkan melalui koran (sebagai salah satu jenis media massa tertua di dunia). Jadi secara sederhana Jurnalisme dan berita, kemudian pers (sebutan untuk perusahaan yang menerbitkan surat kabar) di mana karya-karya Jurnalisme disebarluaskan merupakan tiga serangkai konseptual yang harus dipahami ketika membicarakan jurnalisme.

Lantas, apa itu Jurnalisme Pembangunan (Jupe) dan apa bedanya dengan Jurnalisme yang umum selama ini dikenal. Pertanyaan ini sama persis ketika kita mempertanyakan apa bedanya komunikasi pembangunan dengan komunikasi? Yang pasti Jurnalisme Pembangunan tidak bisa dipisahkan dengan konsep Komunikasi Pembangunan itu sendiri. Seperti halnya dengan Komunikasi Pembangunan, Jupe merupakan ciri khas penerapan Jurnalisme di negara-negara berkembang khususnya di Asia dan Afrika yang pembangunannya lebih tertinggal pada masa kelahiran Jupe.

Alan Chalkley pernah menuturkan dalam kursus dan latihan penulisan di Manila bahwa tanpa harus mengklaim menjadi “*a new kind of journalism*” Jurnalis pembangunan harus memiliki **sikap baru** terhadap issue-issue terkait

dengan pembangunan yang bertugas melayani masyarakat lokal, terutama yang kurang mendapat perhatian media atau pers umumnya. Tidak mengherankan ketika tahun 80-an surat kabar butuh tenaga muda untuk wartawan lebih senang merekrut sarjana bukan dari lulusan komunikasi/jurnalistik, tetapi justru di bidang ilmu tertentu yang terkait dengan persoalan pembangunan. Termasuk tidak sedikit lulusan IPB yang merintis karirnya sebagai jurnalis atau wartawan. Contoh terbaru barangkali anda tahu Duta Besar Indonesia untuk Singapura saat ini. Dulunya lulusan Fakultas Peternakan, pertama mengawali profesinya menjadi wartawan Kompas, kemudian hijrah ke Metro TV, sebelum ditunjuk sebagai dubes.

Aggarwala (1979) memberikan pengertian Jurnalisme Pembangunan sebagai berikut:

“Jurnalisme Pembangunan merupakan proses peliputan pembangunan sebagai proses ketimbang sebagai suatu peristiwa. Artinya penekanan dalam berita pembangunan bukanlah pada kejadian yang terjadi pada waktu atau hari tertentu, melainkan pada apa yang berlangsung selama periode tertentu. Dengan kata lain, seorang jurnalis pembangunan memandang kepada proses pembangunan tersebut (berhenti sesaat, menoleh ke belakang, dan melihat ke depan) untuk menyampaikan kepada khalayak, proses perubahan sosial ekonomi yang bersifat berkesinambungan dan berjangka panjang.”

Aggarwala (1979) selanjutnya menegaskan bahwa berita pembangunan tidak harus diartikan dengan pemberitaan dan informasi yang datang atau dikontrol pemerintah tetapi harus dilihat sebagai bentuk baru **laporan investigasi**.

Sementara di kalangan jurnalis ASEAN telah memberikan pengertian yang lebih luas dan menyepakati bahwa Jurnalisme Pembangunan sebagai jurnalisme yang diprioritaskan untuk mempromosikan dan menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang cepat, keadilan sosial dan keeratan hubungan regional yang lebih besar (Mehra 1989 *dikutip* Xiaoge 2009).

Oleh karena itu, tugas jurnalis (profesi yang mempraktekkan jurnalisme) pembangunan dalam pemberitaannya adalah memeriksa, mengevaluasi dan melaporkan secara kritis proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nasional dan lokal, perbedaan antara rencana dan pelaksanaannya di lapang, dan perbedaan antara klaim keberhasilan oleh pejabat pemerintah dan kenyataannya. Pendapat Aggarwala inilah yang kemudian menjadi dasar konsep Jurnalime Pembangunan.

PENDEKJATAN KONSEPTUAL JURNALISME PEMBANGUNAN

Tidak seperti dalam ilmu-ilmu eksakta yang sering membahas sesuatu fenomena dengan menggunakan pendekatan teori tertentu misalnya teori fotosintesis karena sudah diyakini kebenarannya secara empiris. Dalam ilmu-

ilmu sosial sering menggunakan sebutan konsep, yaitu sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan gagasan secara abstrak suatu fenomena, kejadian, keadaan, individu atau masyarakat yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Oleh karena itu dalam pembahasan berikutnya kita menggunakan sebutan “Konsep Jurnalisme Pembangunan.” Dalam pembahasan ini akan diperkenalkan dua konsep Jurnalisme yang menonjol pada masa pertumbuhannya.

Jurnalisme Investigasi

Jurnalisme Pembangunan lahir bukan dari kalangan ahli atau peneliti, tetapi dari kalangan pers (media massa) yang bila dipelajari berbagai pendapat yang muncul dalam berbagai seminar dan kongres, terutama yang dilontarkan oleh Alan Chalkley, maka gagasan awal Jurnalisme Pembangunan sejalan dengan konsep Jurnalisme Investigasi. Tidak seperti praktek jurnalistik pada umumnya yang hanya menginformasikan dan memberitakan peristiwa yang menarik perhatian sebegini besar orang, bahkan cenderung sensasional, jurnalisme pembangunan selain menginformasikan peristiwa, sekaligus menafsirkannya, dan mempromosikan langkah-langkah untuk mengatasi isu yang diberitakan dikaitkan dengan program-program pembangunan.

Xu (2009) secara eksplisit menyebutnya konsep Jurnalisme Pembangunan ini sebagai Jurnalisme Investigasi yang meminjam pendapat Aggarwala, menekankan pada mempertanyakan dan mengevaluasi secara kritis manfaat/kegunaan proyek-proyek pembangunan. Ketika meliput berita-berita pembangunan, wartawan diharapkan memeriksa, mengevaluasi, dan melaporkan secara kritis (a) relevansi proyek pembangunan dengan kebutuhan nasional atau paling penting dengan kebutuhan lokal, (b) perbedaan antara rencana pembangunan dan pelaksanaannya secara nyata, (c) perbedaan antara dampak kepada masyarakat yang diklaim pejabat pemerintah dan kenyataan yang dirasakan masyarakat (Aggarwala 1979). Akan tetapi Ogan (1982) dengan menggunakan pendekatan teori normatif pers berpendapat bahwa ketika Jurnalisme Pembangunan diartikan sebagai upaya evaluatif dan kritis terhadap program pembangunan yang dilakukan pemerintah, dianggap lebih konsisten dengan teori pers tanggungjawab sosial.

Sejalan dengan pendapat Aggarwala dan beberapa penulis lainnya, Xu (2009) merumuskan komponen kunci dari Jupe yang terdiri dari lima aspek pemberitaan sebagai konsep Jupe yang menggunakan pendekatan atau model jurnalisme investigasi sebagai berikut:

1. Untuk melaporkan perbedaan antara apa yang telah direncanakan untuk dilakukan dan apa yang telah dicapai pada kenyataannya termasuk perbedaan klaim keberhasilan antara pejabat pemerintah dan dampaknya bagi masyarakat.
2. Untuk fokus bukan pada berita kejadian satu hari tetapi pada proses pembangunan jangka panjang.

3. Menjadi independen dari pemerintahan dan memberikan kritik membangun terhadap pemerintah.
4. Fokus Jurnalisme beralih ke pemberitaan pembangunan ekonomi dan sosial sementara bekerja secara konstruktif dengan pemerintah dalam membangun bangsa (nation building).
5. Untuk memberdayakan penduduk lokal dan komunitas untuk memperbaiki kehidupannya sendiri.

Authoritarian-benevolent style of development journalism

Pendekatan konseptual tentang Jurnalisme Pembangunan lainnya berawal dari pendekatan Komunikasi Penunjang Pembangunan (*Development Support Communication*). Konsep ini merujuk kepada proses komunikasi yang hanya digunakan untuk melayani tujuan-tujuan pembangunan di mana kekuasaan ada pada pemerintah. Pemerintah berhak campur tangan misalnya melalui regulasi atau Undang-undang. Biasanya pemerintah di satu sisi berusaha menekan pers atau mengontrol kerja jurnalis, di sisi lain, pers dan jurnalis harus mendukung pemerintah untuk menciptakan stabilitas politik dan menjaga kesatuan. Juga harus mampu meyakinkan publik atau masyarakat terhadap institusi negara/pemerintah dan kebijakannya. Bahasa sederhananya mendukung kebijakan pemerintah di segala sektor kehidupan.

Singkatnya Jurnalisme hanya digunakan sebagai alat pemerintah atau secara kasar menjadi "juru bicara" pemerintah. Menurut Ogan (1982) konsep ini tidak berbeda secara fundamental dengan **teori pers otoriter**³ di mana pers dikontrol sepenuhnya oleh negara (Xu 2009 menyebutnya *authoritarian-benevolent style of development journalism*). Pada pers otoriter yang sesungguhnya bahkan media massa sepenuhnya dikuasai pemerintah dan pihak publik atau masyarakat dilarang misalnya menerbitkan surat kabar. Indonesia di masa orde baru misalnya siaran televisi hanya dimiliki pemerintah, bahkan ketika akhir 90an sudah ada televisi swasta tetap tidak dibolehkan menyiarkan siaran berita kecuali TVRI.

Oleh karena itu Jurnalisme Pembangunan yang menganut *authoritarian-benevolent* sangat kuat disokong pemerintahan otoriter yang percaya bahwa jurnalis harus bekerjasama dengan pemerintah dalam membangun bangsa dan pembangunan sosial, ekonomi, dan politik secara keseluruhan (Xu 2009). Kalangan jurnalis asing menjulukinya "*Government says so Journalism.*"

Lent (1977) memberi alasan mengapa pemerintah boleh campur tangan pada JP, karena negara-negara berkembang banyak yang baru merdeka dan butuh waktu untuk membangun kelembagaannya. Pada periode awal pertumbuhannya pemerintah lebih menekankan pada stabilitas politik dan menjaga kesatuan, sehingga kritik harus diminimalisir dan keyakinan publik terhadap institusi pemerintah dan kebijakannya harus dicapai terlebih dahulu.

³ Referensi klasik yang telah sering dikutip dalam buku-buku Jurnalisme dan komunikasi massa tentang teori pers ditulis bersama oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm berjudul "*Four Theories of the Press*" yang diterbitkan pertama kali pada 1956

Oleh karena itu pers (institusi media massa, khususnya surat kabar) harus bekerjasama dan mendukung pemerintah dengan menekankan pada pemberitaan yang positif, inspiratif, dan mengabaikan hal-hal negatif.

Pendapat Lent (1977) diperkuat pada 1987 di dalam *Asian-Pacific Conference of the International Federation of Journalists* diselenggarakan di HongKong. Para jurnalis mengusulkan membangun model Jurnalisme bahwa pers bekerja bersama pemerintah membangun konsensus nasional. Hal ini dilandasi asumsi bahwa pers barat yang liberal dan sering melakukan konfrontasi dengan kekuasaan akan menyebabkan konflik dengan nilai budaya di Asia maka pers di negara-negara berkembang seharusnya mempromosikan konsensus dan perlu membentuk tim kerja untuk pembangunan ekonomi, budaya, dan politik sebuah bangsa.

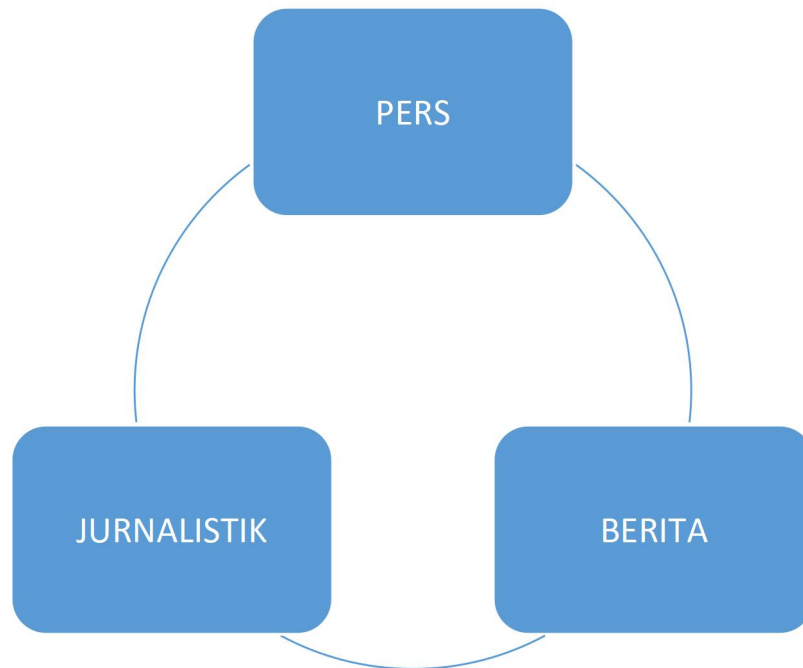
Usaha-usaha "membangkitkan" Jurnalisme pembangunan di Asean khususnya muncul di kalangan praktisi media dan ilmuwan pada tahun 1988 di Jakarta dalam suatu konsultasi untuk mengevaluasi kembali peran dan tanggung jawab pers di negara-negara ASEAN yang disesuaikan dengan nilai-nilai Asia yang multi budaya dan multi etnis serta berusaha menghindari konflik atau menjaga solidaritas dan keharmonisan. Singkatnya pers di Asean khususnya, mengutamakan promosi dan menjaga stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang cepat, keadilan sosial dan keeratn hubungan regional yang lebih besar.

PRINSIP-PRINSIP JURNALISME PEMBANGUNAN

Pers, Jurnalistik dan Berita: Tiga Serangkai Konseptual

Pada awal pertumbuhannya, setidaknya pada pertengahan tahun abad ke-16 telah dibuktikan, jurnalisme sebagai bentuk paling awal komunikasi massa tidak bisa dilepaskan dari sistem pers yang dianut sebuah negara. Demikian pula telah diakui bahwa karya jurnalistik yang utama disebut berita, yang merupakan terjemahan dari kata *news*. Sebagai konsep, berita memiliki pengertian yang spesifik sehingga tidak bisa disepadankan dengan kabar, meskipun media berita tercetak di Indonesia juga disebut surat kabar atau koran. Bila kita bertanya keadaan sahabat yang sudah lama tidak bertemu, lebih sering kita menanyakan; "Bagaimana kabarnya?" bukan "Bagaimana beritanya?"

Bisa dikatakan tiga serangkai konsep ini, yaitu pers, jurnalistik, dan berita saling menentukan atau mempengaruhi satu sama lain. Secara ilustratif hubungan ketiganya bisa digambarkan dalam ilustrasi berikut:



Gambar. Keterkaitan antara pers, jurnalistik dan berita

Pers, yang bahasa Inggrisnya press, dalam pengertian yang umum berkaitan dengan persuratkabaran, karena produk pers yang pertama dan utama adalah surat kabar atau koran. Sebagai suatu sistem, pers hanyalah bagian atau subsistem yang lebih luas dari sistem komunikasi. Sudah tentu juga sangat dipengaruhi pula oleh sistem sosial dan budaya, dan sistem pemerintahan. Yang terakhir inilah yang menentukan corak sistem pers yang berbeda dari satu negara ke negara lainnya.

Pers memiliki pengertian yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan/menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada masyarakat luas. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan yang melewati proses pencetakan (press), seperti surat kabar harian, majalah mingguan dan bulanan, dan sebagainya yang dikenal sebagai media (massa) cetak (Rachmadi 1990).

Setidaknya ada tiga kedudukan pers di masyarakat yang diakui; (1) sebagai media komunikasi massa, (2) sebagai institusi sosial, dan (3) pers sebagai industri atau perusahaan (Rachmadi 1990; UU Nomor 40/1999). Sebagai media komunikasi massa, pers hanyalah berperan sebagai perantara atau saluran (channel) untuk menyampaikan pernyataan kepada khalayak atau masyarakat luas (ingat SMCR model dalam komunikasi). Sebagai institusi sosial, pers hanyalah sub sistem dari sistem sosial yang lebih luas, selalu bergantung dan berkaitan erat dengan masyarakat di mana pers berada dan bahkan saling mempengaruhi satu sama lain. Pers mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial atau sebagai “watch dog” bagi pemerintahan yang demokratis. Sejauhmana pers menjalankan fungsi ini bisa dipelajari dari pemberitaan yang dibuat dan disebarkan, khususnya melalui koran. Pentingnya kedudukan dan fungsi pers di suatu negara antara lain pers dinobatkan sebagai kekuasaan/kekuatan keempat (fourth estate) di samping kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Sebagai industri pers harus dijalankan secara profesional karena melibatkan modal dan sumberdaya manusia yang tidak kecil, sehingga perusahaan pers harus dikelola dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi seperti industri lainnya, dengan produk utamanya informasi dan berita. Inilah yang membuat industri pers harus diatur secara khusus, karena tidak hanya mementingkan fungsi ekonomi semata tetapi juga fungsi sosial.

Sistem pers yang pernah berkembang di dunia secara ringkas disarikan di dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan sistem pers dunia

Sistem Pers	Ciri-ciri	Negara
1. Pers Otoriter	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembang pada abad 15-16 - Pemerintahan otoriter (kerajaan absolut) - Berfungsi mendukung negara untuk memajukan rakyat - Berada sepenuhnya di bawah pengawasan negara 	Seluruh negara di Eropa Barat
2. Pers Liberal	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembang pada abad 17-18 akibat revolusi industri dan perubahan besar dalam pemikiran (abad pencerahan) - Pers harus mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya untuk membantu manusia mencari kebenaran - <i>Freedom of speech</i> - Berita tidak hanya menyajikan fakta tapi juga opini 	Eropa Barat
3. Pers Soviet Komunis	<ul style="list-style-type: none"> - Berkembang awal abad 20 - Media massa merupakan alat pemerintah (partai) - Pers bagian integral negara - Dikontrol/dikuasai sepenuhnya oleh negara 	Uni Soviet
4. Pers Tanggung Jawab Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pertengahan abad 20 - Kebebasan pers harus disertai tanggung jawab kepada masyarakat - Pers mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas pokok yang dibebankan kepada komunikasi massa - Lahirnya teori fungsi komunikasi massa 	Amerika Serikat

Prinsip-prinsip Jurnalistik Pembangunan (McQuail 1987)

Sistem pers yang telah dibahas sebelumnya sudah pasti mempengaruhi model jurnalistik yang diterapkan, terutama sistem pers liberal yang hanya bersandar pada prinsip "kebebasan berekspresi" sebagai hak asasi manusia. Sementara di negara-negara berkembang, khususnya di Asia, yang ibarat balita yang sedang tumbuh, jurnalistik gaya barat dianggap tidak cocok. Karena keempat sistem pers itu tidak dapat diterapkan di negara-negara berkembang maka perhatian utama difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi di dunia ketiga (McQuail 1987).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Denis McQuail dalam bukunya "*Mass Communication Theory* (1987) menawarkan prinsip-prinsip Jurnalistik Pembangunan

yang dalam beberapa hal mirip dengan konsep *Authoritarian-benevolent*. Prinsip utamanya dirumuskan sebagai berikut:

Prinsip pertama:

Media seyogyanya menerima dan melaksanakan tugas pembangunan positif sejalan dengan kebijaksanaan dan ditetapkan secara nasional.

Prinsip kedua:

Kebebasan media seyogyanya dibatasi sesuai dengan prioritas ekonomi dan kebutuhan pembangunan masyarakat

Prinsip ketiga:

Media perlu memprioritaskan isinya pada kebudayaan dan bahasa nasional

Prinsip keempat:

Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara sedang berkembang lainnya yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan, atau politik.

Prinsip kelima:

Para wartawan dan karyawan media lainnya memiliki tanggungjawab serta kebebasan dalam tugas mengumpulkan informasi dan penyebarluasannya.

Prinsip keenam:

Bagi kepentingan tujuan pembangunan, negara memiliki hak untuk campur tangan dalam, atau membatasi, pengoperasian media serta sarana penyensoran, subsidi, dan pengendalian dapat dibenarkan.

Sesuai dengan prinsip pertama, kebijakan di bidang pers di Indonesia misalnya, selama masa orde baru diarahkan menjadi pers pembangunan atau yang kemudian oleh Dewan Pers pada 1984 disebut Pers Pancasila. Hal ini dituangkan dalam UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang "Ketentuan Pokok Pers" yang kemudian diubah dengan UU No 21 Tahun 1982. Tugas-tugas positif pembangunan antara lain tercermin dengan "sentimen" pemberitaan pembangunan bila membandingkan berita positif dan berita negatif, maka persentase berita positif mencapai 71 persen, sedangkan berita negatif hanya 29 persen (McKay 1993).

Pada prinsip kedua, sejalan dengan konsep awal Jurnalisme Pembangunan yang digagas Press Foundation of Asia (PFA) dan bila di Indonesia diformulasikan dalam rumusan "Pers yang bebas dan bertanggung jawab." Konsep ini sekaligus memberikan kebebasan kepada wartawan tetapi sekaligus memiliki tanggung jawab dalam pemberitaan yang dibuatnya sebagaimana disebutkan dalam prinsip kelima.

Prinsip ketiga dipenuhi dalam penerbitan pers di Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa jurnalistik utama, meskipun dalam perkembangannya ada juga yang berbahasa Mandarin dan Bahasa Inggris. Ketika penduduk Indonesia masih banyak yang buta huruf maka koran menjadi media yang efektif untuk meningkatkan literasi ketika mengikuti program pemberantasan buta huruf dan angka. Bahkan sampai kini masih ada sebagian kecil penduduk Indonesia yang berusia lanjut yang belum bisa membaca dan menulis atau berbahasa Indonesia dengan lancar.

Prinsip keempat, yang berbunyi "Media hendaknya memprioritaskan berita dan informasinya pada negara sedang berkembang lainnya yang erat kaitannya secara geografis, kebudayaan, atau politik," merupakan misi khusus dari kantor berita DEPTHNews di bawah PFA. Kantor berita ini memfasilitasi pertukaran berita dan informasi khusus untuk negara-negara berkembang di Asia. Sebagaimana telah diteliti oleh McKay pada 1993 bahwa wilayah liputan DETHnews terutama adalah peristiwa domestik dengan melibatkan warga darimana artikel/berita berasal. Jumlahnya mencapai 57 persen, sementara yang berasal dari Pan-Asia (global) sebanyak 21 persen,

hubungan atau interaksi utara-selatan sebanyak 14 persen, dan hanya 7 persen yang berasal dari hubungan selatan-selatan.

Prinsip yang keenam yang membolehkan campur tangan pemerintah dalam pers tampaknya merupakan ciri yang mendasar dari penerapan konsep *Authoritarian-benevolent* yang telah disebutkan di awal. Sekaligus dalam rangka menetapkan statuta informasi/komunikasi yang direkomendasikan Schramm (1964) antara lain dengan membentuk Departemen Penerangan (sekarang Kementerian Komunikasi dan Informatika). Inilah yang menjadi pangkal kritik para peneliti karena dianggap legitimasi terhadap campur tangan pemerintah, termasuk oleh konseptor awal Jurnalisme Pembangunan.

Lima Prinsip Jurnalistik Pembangunan (Hermant Shah 1996)

Berbeda dengan “teori” McQuail yang menekankan hubungan media/pers dengan masyarakat yang secara eksplisit memberikan penegasan peran pemerintah, Shah (1996) telah merangkum prinsip jurnalisme pembangunan sebagai Lima Prinsip Jurnalistik Pembangunan. Tiga yang pertama terkait dengan praktik reportase dan penulisan berita, sedangkan dua yang terakhir menyangkut peran jurnalis itu sendiri.

Prinsip Pertama:

Jurnalistik pembangunan **memperhatikan aspek sosial, budaya dan politik pembangunan, bukan hanya ekonomi**. Jurnalisme pembangunan mempromosikan dan berkontribusi pada **pembangunan manusia**, yang berfokus pada membantu orang memenuhi kebutuhan dasar mereka, **memberdayakan orang** untuk mengartikulasikan keprihatinan mereka dan mengelola pembangunan mereka, dan memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan.

Prinsip pertama ini memberikan implikasi dalam peliputan dan pemberitaan, pers khususnya, tidak cukup hanya menyoroti pembangunan ekonomi, sebagaimana didedikasikan pada awal konsep Jurnalistik Pembangunan diperkenalkan. Tetapi mencakup semua aspek dan arah pembangunan di suatu negara. Shah (1996) bahkan menyebutnya jurnalistik pembangunan sebagai “emancipatory Journalism”. Sebagai contoh, Indonesia di masa orde baru pernah menganut asas Trilogi Pembangunan yaitu Pertumbuhan-Pemerataan-Stabilitas. Sejalan dengan modernisasi negara-negara sedang berkembang, sehingga hampir seluruh pemberitaan pers masa itu menggunakan “frame” pembangunan.

Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu ukuran modernisasi di bidang ekonomi. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka “kue” pembangunan dapat didistribusikan kembali ke masyarakat sebagai alat pemerataan. Untuk mencapai itu semua negara harus berada dalam kondisi yang stabil dan aman sebagai prasyaratnya.

Berdasarkan prinsip yang pertama ini, sah-sah saja memberitakan program-program pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah melalui perencanaan terpusat, akan tetapi harus ditujukan untuk promosi dan berkontribusi untuk pembangunan manusia, terutama untuk memberdayakan kelompok masyarakat yang berada dalam posisi marjinal atau “orang pinggiran.” Tanpa harus terjebak sebagai alat propaganda pemerintah.

Prinsip Kedua:

Jurnalistik pembangunan bersifat **demokratis** dan menekankan **komunikasi dari “bawah ke atas”**. Pelaporan dari bawah atau “orang pinggiran” menghasilkan berita yang **mencakup suara dan perspektif orang-orang yang paling terpengaruh oleh modernisasi**. Dengan memprioritaskan pandangan masyarakat di tingkat akar rumput, jurnalisme pembangunan memungkinkan mereka mengakses khalayak massa dan membuat kebijakan.

Prinsip yang kedua ini bisa ditafsirkan bukan hanya mendekati pers kepada masyarakat bawah, tetapi bagaimana agar pemberitaan pers harus mampu menyuarakan apa yang dikehendaki dan diharapkan masyarakat bawah, khususnya masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Karena umumnya kelompok ini masih hidup dengan tradisinya seringkali sulit menerima inovasi dan modernisasi kehidupan sosial-ekonominya, sehingga sering terpengaruh dampak negatif modernisasi.

Persoalan yang dihadapi kalangan jurnalis pembangunan dalam peliputan beritanya harus dapat menjangkau sumber beritanya yang terletak jauh dari tempat mereka bekerja, bahkan kadang harus melewati kondisi alam yang tidak ramah dan yang mereka hadapi adalah orang awam yang tidak semenarik artis ibukota yang biasa menjadi buruan para “nyamuk pers.” Peristiwa-peristiwa di pinggiran yang biasanya menjadi perhatian pers biasanya hanya bila ada bencana, semacam Erupsi Gunung Semeru beberapa waktu lalu, atau banjir dan tanah longsor. Karena ada “anggapan bahwa “A bad news is a good news.” Sementara Jurnalistik Pembangunan menganut “A good news is a good news.”

Prinsip Ketiga:

Jurnalistik pembangunan bersifat pragmatis dan tidak konvensional dalam pendekatannya terhadap pelaporan. Jurnalistik pembangunan membuat upaya eksplisit untuk **mempromosikan reformasi dan mendorong aksi sosial**.

Prinsip ketiga terkait erat dengan konsep jurnalisme investigasi, di mana jurnalis tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi menafsirkan peristiwa dan implikasinya bagi pembangunan sehingga mampu mempromosikan perubahan besar serta mendorong aksi sosial. Jurnalis seakan bertindak sebagai *aktifis sosial* melalui karya jurnalistiknya. Inilah yang kelak melahirkan jurnalisme advokasi dan jurnalisme untuk mobilisasi dan membangun aliansi pelaku-pelaku pembangunan.

Prinsip Empat:

Jurnalis pembangunan berperan sebagai intelektual profesional, menyediakan energi untuk **gerakan sosial dan membantu menciptakan kesadaran tentang perlunya tindakan**. Jurnalis dapat membantu “**mengartikulasikan keprihatinan** yang muncul dalam bentuk protes, menempatkannya ke dalam kerangka yang lebih luas,” dan menunjukkan “**makna yang lebih dalam dan signifikan**.”

Jurnalis pembangunan melihat berbagai peristiwa secara ilmiah (saintifik) dan secara teknis harus memahami materinya. Inilah salah satu alasan pada era 80an, banyak industri pers di Indonesia lebih senang merekrut calon wartawan bukan dari sarjana komunikasi atau jurnalistik, tetapi yang lebih menguasai “*subject matter*” seperti sarjana hukum, sarjana ekonomi atau sarjana pertanian dan sebagainya. Melalui karya-

karya jurnalistik mereka diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat, misalnya tentang masalah-masalah lingkungan hidup, sehingga mampu menggerakkan mereka melakukan “gerakan peduli lingkungan” melalui aksi sosialnya berupa bersih-bersih sungai dan pantai.

Jurnalis pembangunan juga harus peduli kepada “wong cilik” sehingga harus mampu mengekspos kehidupan mereka sehingga diharapkan mampu membangkitkan simpati dan empati berbagai kalangan, termasuk pengusaha dan pemerintah. Contoh yang menarik adalah eksperimen Jurnalistik Pembangunan yang dilakukan sebuah koran di India, yaitu “Hindustan Times” yang menyediakan suatu kolom yang merupakan halaman khusus yang diberi judul “Our Village Chhatera.” Tulisan yang dimuat di kolom ini menceritakan kehidupan masyarakat desa terpencil Chhatera. Tujuannya untuk memperlancar ide-ide baru ke dalam masyarakat desa dan menyuarakan aspirasi mereka dengan jelas (Sinha *dalam* Jahi 1988).

Meskipun hanya bertahan selama sembilan tahun, namun berhasil menarik perhatian lapisan atas masyarakat India, seperti ilmuwan, administrator, perencana, komunikator, penyuluh, pengusaha yang menaruh minat pada perdagangan di daerah pedesaan, diplomat dan sebagainya. Selama sembilan tahun itu Desa Chhatera banyak memperoleh bantuan, dari pembangunan jembatan, petugas kesehatan, perencana desa, bank desa, traktor dan bahkan sarana komunikasi televisi.

Prinsip Kelima:

Jurnalis pembangunan mendorong produksi jurnalistik pembangunan di berbagai lokasi, baik secara geografis maupun dalam struktur keseluruhan industri berita. Oleh karena itu, jurnalis pembangunan **harus mengadvokasi** “baik pengembangan media alternatif, biasanya terlokalisasi, dan pemantauan kritis, intervensi, dan terkadang penggunaan media arus utama.

Prinsip yang kelima ini diimplementasikan, bukan hanya mendorong pers tumbuh dan berkembang di daerah regional seperti ibukota propinsi dan kabupaten, tetapi di beberapa negara ditempuh kebijakan program “*Community Newspaper*” yang di Indonesia diberi nama program “Koran Masuk Desa.”⁴ Seperti pernah disinggung dalam kuliah Dasar Komunikasi Pembangunan, tugas jurnalis pembangunan meliputi tiga hal, yaitu: menulis dan mengedit berita-berita pembangunan untuk media cetak, mengelola produksi koran komunitas, dan menyiapkan publikasi untuk penyuluhan.

Alasan munculnya *Community Newspaper* karena surat kabar di negara-negara berkembang menunjukkan ciri urban yang kuat. Perhatian besar hanya ditujukan pada peristiwa politik, isu-isu orang kota dan pembangunan di perkotaan. Berita-berita semacam ini jelas bukan konsumsi masyarakat desa.

Selama masa keemasan koran komunitas, terdapat lima koran komunitas di Asia yang dianggap berhasil karena sirkulasinya menembus angka 4.500 sampai 17.500 eksemplar. Salah satunya adalah harian “Pikiran Rakyat” yang menerbitkan KMD edisi Cirebon dan Ciamis dari Indonesia (Maslog 1985).

⁴ Program Koran Masuk Desa berada di bawah pembinaan Departemen Penerangan pada PELITA III (Pembangunan Lima Tahun ketiga 1979-1984) yang pada awal proyek sudah ada 27 surat kabar pedesaan di 13 propinsi. Dua tahun kemudian, terbit 47 surat kabar pedesaan di 26 propinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggarwala. 1979. What is Development News? *Journal of Communication* 29, no 2. Spring (1979): 181-2.
- Chalkley A, 1980. Development journalism – a new dimension in the information process. Singapore. *Media Asia*. Volume 7. Issue 4: 215-217.
- Childers E, 1976. 'Taking Humans into Account.' *Media Asia* 3, no. 2 (1976):87-90. - The Commission on Freedom of the Press. A Free and Responsible Press. Chicago: University Depari E, McAndrews C. Ed. 1988. *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan: Suatu Kumpulan Karangan*. Yogyakarta. Gadjahmada University Press.
- Dila, S. 2007. *Komunikasi Pembangunan: Pendekatan Terpadu*. Bandung. Simbiosia Rekatama Media.
- Hadiyanto. 2014. *Komunikasi Pembangunan: Perspektif Modernisasi*. Bogor. IPB Press. [IPB] Institut Pertanian Bogor. Panduan Kurikulum IPB 2020. [www//panduan.ipb.ac.id](http://www.panduan.ipb.ac.id)
- Jahi, A. 1988. *Komunikasi Massa dan Pembangunan Pedesaan di Negara-negara Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Gramedia.
- Jayaweera N, Amunugama S, Ed. 1987. *Rethinking Development Communication*. Singapore. AMIC.
- Maslog CC. 1985. *Five Successful Asian Community Newspaper*. Singapore. AMIC.
- McKay, F. J. 1993. Development Journalism in an Asian Setting: A Study of Depthnews. *International Communication Gazette* 1993; 51; 237. DOI: 10.1177/001654929305100304
- McQuail, D. 1987. *Mass Communication Theory*. Second edition. Edisi Indonesia diterjemahkan oleh Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Nasution, Z. 1996. *Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Cetakan Ketiga. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ogan, C. L. 1982. Development Journalism/Communication: the Status of the Concept. *International Communication Gazette* 1982; 29; 3. Sage Publications
- Rachmadi, F. 1990. *Perbandingan Sistem Pers*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Schramm, W. 1964. *Mass Media and National Development: The role of information in the developing countries*. Unesco. Paris. Standford University Press.
- Shah, H. 1996. Modernization, marginalization, and emancipation: Toward a normative model for journalism and national development. *Communication Theory*, 6, 143–166.

Xu Xiaogue. 2009. Development Journalism. *dalam*. Karin Wahl-Jorgensen, Thomas Hanitzsch. Editor. 2009. The Handbook of Journalism Studies. New York. London. Routledge.

